

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Seiring dengan perkembangan akutansi sektor publik di Indonesia, maka kebutuhan akuntabilitas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas kinerja pemerintah menjadi suatu tuntutan yang umum. Peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah mengamanatkan bahwa keuangan daerah agar dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab. Terkait pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), disebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adanya tuntutan akuntabilitas, artinya pemerintah harus memberikan informasi atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah daerah kepada pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2002). Hal ini berbanding lurus dengan keinginan masyarakat untuk pemerintah yang transparan dan bebas dari tindak kecurangan.

Pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik harus dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut Suwardjono (2005), informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan harus bermanfaat bagi para pemakai, diantaranya harus memiliki nilai atau kualitas yang dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Pemerintah daerah akan mampu mewujudkan transparansi serta akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan daerah apabila informasi yang terdapat didalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mampu memenuhi karakteristik kualitatif yang telah tercantum dalam peraturan pemerintahan No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan, serta dapat dipahami. Dengan menerapkan kriteria tersebut dalam laporan keuangan yang telah disusun dan disajikan maka pemerintah daerah dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat penting, sebagai bentuk tata kelola pemerintahan yang baik. Laporan keuangan yang memiliki kualitas, dapat memberikan suatu manfaat dalam pengambilan kebijakan pemerintah dimasa yang akan datang. Jika laporan keuangan sudah mampu memberikan manfaat dalam pengambilan keputusan maka akan membawa percepatan pembangunan dan pemantasan kemiskinan yang ada. Untuk itu pemerintah daerah harus mampu dan memiliki kemampuan dalam menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan itu harus mampu menyajikan informasi keuangan yang berkualitas dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Syarat terpenuhinya laporan keuangan sudah berkualitas salah satunya dengan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan pemerintah daerah yang sudah di periksa oleh BPK.

Berdasarkan data dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang dilakukan BPK Tahun 2020, menunjukkan bahwa opini wajar tanpa pengecualian atas 485 (90%) LKPD, opini wajar dengan pengecualian atas 50 (9%) dan opini tidak menyatakan pendapat atas 6 (1%). Jumlah opini wajar tanpa pengecualian

mengalami peningkatan dibandingkan dengan LKPD tahun 2018 yaitu 82%. Untuk hasil pemeriksaan Pemerintah Kota Semarang dimana BPK masih menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain permasalahan mengenai pengelolaan persediaan, pengelolaan kas, kekurangan volume atas pekerjaan belanja modal, dan kelebihan pembayaran atas belanja modal (*bpk.go.id*). Berdasarkan temuan kasus yang ada serta opini wajar tanpa pengecualian yang telah diraih kota Semarang, namun masih terdapat kelemahan dalam hal sistem pengendalian intern karena disebabkan oleh berbagai faktor, seperti masih terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang tidak sesuai dengan SAP (*bpk.go.id*).

Beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yaitu tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan salah satu tahapan pendidikan yang telah ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi mampu meningkatkan kemampuan seseorang dalam memperbaiki kinerja. Dalam hal ini jenjang pendidikan yang telah mempelajari ilmu akuntansi nantinya akan berpengaruh dengan kualitas laporan keuangan. Buruknya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menuntut setiap pengelola keuangan harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai laporan keuangan sehingga tidak menyesatkan pembaca dan pengguna laporan. Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan, pengaturan keuangan dan anggaran daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel menuntut sumber daya manusia yang berkualitas dan salah satu faktor adalah tingkat pendidikan.

Semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan semakin tinggi pengetahuan dan intelektualitas seseorang dalam pembuatan laporan keuangan. Menurut Sukriani dkk (2018), tingkat pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan menurut Wungow dkk (2016), tingkat pendidikan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini disebabkan karena tidak semua pegawai yang memiliki tingkat pendidikan tinggi paham dan bisa menyelesaikan permasalahan dalam laporan keuangan daerah. Ini dikarenakan kesalahan dalam penempatan pegawai, dimana masih banyak pegawai yang ditempatkan tidak sesuai dengan keahliannya.

Faktor lain yaitu kompetensi sumber daya manusia, Kompetensi mempunyai karakteristik yang mendasari seseorang mencapai suatu kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Seseorang yang mempunyai kompetensi akan bekerja dengan pengetahuan dan ketrampilannya sehingga dapat bekerja dengan mudah, cepat, intuitif dan dengan pengalamannya bisa meminimalisir kesalahan. Maka demikian juga mengenai persiapan dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas memerlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi serta menguasai akuntansi pemerintahan (Kuasa, 2016). Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, dan dengan didukung latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan memiliki pengalaman di bidang keuangan. Sehingga untuk menerapkan system akuntansi, sumber daya manusia yang berkualitas tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan Sumber Daya Manusia pemerintah daerah dapat memahami dan

menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Kalumata dkk, 2016). Hasil penelitian oleh Mahardini dan Miranti (2018) kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan menurut Aswandi (2018) kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Karena kemampuan untuk melakukan pekerjaan harus berdasarkan pengetahuan, ketrampilan serta sikap kerja akan mempengaruhi kualitas dari pekerjaan. Dalam proses kerja banyaknya masalah yang dijumpai dan membutuhkan penyelesaian yang tepat. Namun tidak semua pegawai memiliki kemampuan untuk memutuskan, kapan dan bagaimana menyelesaikan masalah tanpa menghambat pekerjaan.

Variabel berikutnya yaitu komitmen organisasi dimana komitmen tersebut harus dibangun atas dasar kepercayaan pekerja pada nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi. Adanya komitmen organisasi maka setiap pekerja akan memiliki tanggung jawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasinya dan mempunyai motivasi tinggi dalam melaporkan segala aktivitas dan termasuk dalam penyusunan laporan keuangan dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Oktavia dan Rahayu, 2019). Hasil penelitian oleh Oktavia dan Rahayu (2019), komitmen organisasi secara simultan berpengaruh dan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Disebabkan karena masih belum semua memiliki perasaan berat meninggalkan

organisasi karena kebutuhan untuk bertahan dengan pertimbangan biaya apabila meninggalkan organisasi. Sedangkan menurut Mutiana dkk (2017) komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.

Variabel terahir yaitu pemanfaatan teknologi informasi akuntansi, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan semakin meningkatnya taraf pendidikan masyarakat dewasa, berimplikasi pada semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan informasi yang berkualitas. Kondisi masyarakat yang semakin kritis tersebut menuntut organisasi sektor publik untuk dapat mengelola pelayanan publik secara lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel (Bastian 2010). Pengguna teknologi informasi dalam akuntansi diharapkan dapat meningkatkan kinerja para akuntan dalam menyusun laporan keuangan dengan cepat serta dengan data yang akurat (Aswandi, 2018). Hasil penelitian oleh Aswandi (2018), pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan. Permasalahan yang terjadi adalah kurangnya kesadaran masing-masing individu untuk memanfaatkan teknologi informasi yang sudah ada semaksimal mungkin dalam penyusunan laporan keuangan. Sedangkan menurut Sukriani dkk (2018) pengguna teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan researchgap di atas peneliti menilai bahwa penelitian ini sangat penting dilakukan mengingat masih terdapat banyak perbedaan dari hasil penelitian terdahulu. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pendidikan,**

Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Organisasi Pemerintah Daerah Kota Semarang)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di OPD Kota Semarang?
2. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di OPD Kota Semarang?
3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di OPD Kota Semarang?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di OPD Kota Semarang?
5. Apakah tingkat pendidikan, kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di OPD Kota Semarang?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Dari rumusan masalah yang telah disampaikan diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan terhadap kualitas laporan keuangan di OPD Kota Semarang.
2. Untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan di OPD Kota Semarang.
3. Untuk menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan di OPD Kota Semarang.
4. Untuk menguji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan di OPD Kota Semarang.
5. Untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan, kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan di OPD Kota Semarang.

Dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Universitas

Dapat dijadikan bahan referensi untuk mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang serupa.

2. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang luas terkait kualitas laporan keuangan.

1.4 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian. Dalam laporan penelitian ini, sistematika penulisan terdiri

atas lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang materinya sebagian besar berisikan tentang latar belakang mengenai pengaruh tingkat pendidikan, kompetensi sumber daya manusia, dan komitmen organisasi, kualitas laporan keuangan, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang penjelasan metode yang digunakan dalam penelitian, data-data penelitian, sumber data penelitian, serta model pengujian terhadap data yang diperoleh.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang analisis dan pembahasan yang berisi tentang analisis hasil pengolahan data yang telah diolah dan membahas hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah kesimpulan yang berisikan kesimpulan dan saran untuk penelitian berikutnya.